



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
DINAS PERHUBUNGAN**

Jln. Jendral Sudirman Painan – Sago Telp/Fax (0756) 7464239



**REVISI  
RENCANA STRATEGIS  
( RENSTRA )  
TAHUN 2016-2021**



**DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

## KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 yang merupakan tugas sektoral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, disiapkan guna merespon dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal. Perubahan lingkungan strategis tersebut diprediksi akan melatarbelakangi beberapa perubahan skema-skema perencanaan dalam bentuk rencana kerja dan rencana anggaran pembangunan yang disusun berdasarkan penganggaran terpadu (*unified budget*) menurut klasifikasi organisasi, fungsi dan jenis belanja serta penyusunan program kerja yang berkesinambungan (*sustainable program*) berbasis kinerja, sehingga akan mewarnai penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

Meskipun terjadi berbagai perubahan lingkungan strategis, perencanaan pembangunan Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan senantiasa tetap berpegang kepada pendekatan kesisteman agar pembangunan perangkat keras (*hardware*) seiring sejalan dan terpadu dengan pembangunan perangkat lunak (*software*) serta pengembangan sumber daya manusia (*brainware*). Selain itu perencanaan yang dilakukan harus tetap bersifat rasional (terukur secara kuantitatif), menyeluruh/komprehensif (mencakup semua aspek/subsistem) dan terpadu/integral (antar aspek/subsistem), mengikuti perkembangan (konstektual), antisipatif (responsif) serta berkelanjutan (berkesinambungan).

Painan, 13 Agustus 2019



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I : Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	3
1.4. Sistematika Penulisan .....	3
<b>BAB II : Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan .....</b>	<b>5</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Perhubungan .....	5
2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan .....	14
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan .....	16
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan	21
<b>BAB III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas perhubungan .....</b>	<b>22</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan .....	22
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	23
3.3. Telaahan Renstra Kementrian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat .....	23
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	25
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	26
<b>BAB IV : Tujuan dan Sasaran .....</b>	<b>27</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan .....	27

BAB V	: Strategi dan Arah Kebijakan .....	29
	5.1. Strategi .....	29
	5.2. Arah Kebijakan .....	29
BAB VI	: Rencana Program dan Kegiatan .....	32
	6.1 Rencana Program dan Kegiatan .....	32
	6.2 Program Kegiatan dan Pendanaan Indikatif .....	35
BAB VII	: Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....	41
BAB VIII	: Penutup .....	44

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan salah satu dasar dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan yang penjabarannya dituangkan dalam suatu Rencana Strategis Dinas yang menjadi pedoman kerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan untuk program kerja tahunan disusun suatu rencana kerja sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut bahwa Kepala SKPD berperan dan bertanggung jawab untuk menyiapkan rencana kerja SKPD serta keterkaitan visi misi Kepala Daerah dengan memenuhi prinsip-prinsip teknokratis (strategis), demokratis dan partisipatif politis, perencanaan bottom up serta perencanaan top down.

Menyelaraskan dengan amanat yang terkandung dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Renja SKPD sebagai penjabaran Rensta SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sehingga dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja Dinas Perhubungan menerjemahkan, mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ke dalam program dan kegiatan Dinas sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program Dinas secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam perspektif jangka panjang ketiga paradigma tersebut diharapkan menjadi landasan untuk mewujudkan suatu pemerintah Daerah yang bercirikan “Good Governance“ yang lebih kompetitif, terbuka, demokratis dengan aparatur Negara yang Bersih, serta tanggung jawab dan profesional dalam masing- masing bidangnya, sehingga mempercepat proses tercapainya masyarakat yang lebih beradab (*Civilized Society*) sebagai bagian integral dan sistem dan proses pembangunan daerah.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, untuk mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dimaksud diperlukan dukungan aparatur yang memiliki profesional, adaptif responsif, tanggap dan aspiratif serta pembiayaan yang memadai, peralatan/sarana yang lengkap dengan organisasi dan manajemen yang kondusif di tingkat daerah.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 adalah :

- 1) Undang- Undang No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
- 2) Undang- Undang No 17/2003 tentang Keuangan Negara
- 3) Undang- Undang No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 4) Undang- Undang No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- 5) Peraturan Pemerintah No 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 6) Peraturan Pemerintah No 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6/2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan No 3 tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- 12) Peraturan Bupati No 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 8 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2005 – 2025
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan 2010 - 2030

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan alokasi anggaran Dinas, strategi, arah kebijakan dan program serta kegiatan yang harus dilaksanakan selama 5 tahun ke depan.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 adalah untuk menjabarkan Rencana Makro Visi, Misi dan program Kepala Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun **2016 – 2021**.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan rencana strategis adalah sebagai berikut :

#### **Bab 1 Pendahuluan**

- 1.1 Latar belakang penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
- 1.2 Maksud dan tujuan
- 1.3 Landasan hukum dan kedudukan dan peranan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **Bab 2 Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi,
- 2.1 Sumber Daya Dinas Perhubungan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

#### **Bab 3 Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Perhubungan**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan, Kabupaten Pesisir Selatan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih,
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan serta renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

**Bab 4 Tujuan dan Sasaran**

4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah.

**Bab 5 Strategi dan Arah Kebijakan**

5.1 Strategi

5.2 Kebijakan

**Bab 6 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

6.2 Pendanaan Indikatif

**Bab 7 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

**Bab 8 Penutup**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN**

#### **2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan**

Tupoksi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan diatur Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2016 :

Membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang perhubungan Kabupaten; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyusunan rencana strategis Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- b. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia serta pembinaan di bidang perhubungan;
- c. pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi di bidang perhubungan;

- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang sarana prasarana dan keselamatan jalan, bidang lalu lintas dan angkutan jalan, bidang perhubungan laut dan lalu lintas angkutan sungai dan penyeberangan;
- f. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran dinas;
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- h. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi program dan kegiatan bidang perhubungan;
- i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan dinas

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan dinas perhubungan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran dinas perhubungan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dokumentasi, perencanaan dan pelaporan dinas;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dinas;
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

### **Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan Dan Pelaporan**

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, anggaran dan keuangan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perhubungan

Dalam melaksanakan tugas pokok, sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
- c. pengkoordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan dari bidang;

- d. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja dinas;
- e. pelaksanaan penyusunan renstra dinas;
- f. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran dinas;
- g. penyusunan program kerja tahunan dinas;
- h. pelaksanaan penatausahaan keuangan dinas;
- i. pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- j. penyimpanan berkas-berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
- k. pengkoordinasi dan penghimpunan laporan Rencana Strategis, Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara, Standar Operasional Pelayanan, Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah, Laporan Kinerja dan laporan lainnya;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

#### **Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara di lingkungan dinas

Dalam melaksanakan tugas pokok, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan urusan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan administrasi umum;
- b. penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. penyiapan pelaksanaan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai;
- d. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

#### **Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan**

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Lalu Lintas dan Angkutan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;

- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Seksi Lalu Lintas**

Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait lalu lintas.

Untuk melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud Seksi Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di seksi lalu lintas;
- b. penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten;
- c. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah Kabupaten yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten;
- d. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten;
- e. penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten;
- f. penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten dan penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten;
- g. penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten;
- h. pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten;
- i. persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

### **Seksi Angkutan**

Seksi Angkutan mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait angkutan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Angkutan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di seksi angkutan;
- b. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah kabupaten;
- c. penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;

- d. penetapan rancana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten;
- e. penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;
- f. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah kabupaten;
- g. penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah kabupaten;
- h. penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah kabupaten;
- i. penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten;
- j. penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- k. penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten;
- l. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha;
- m. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
- n. penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam dalam daerah kabupaten; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

### **Seksi Pengujian Sarana**

Seksi Pengujian Sarana mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi pengujian sarana.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Pengujian Sarana mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja seksi pengujian sarana mengacu pada rencana kerja bidang lalu lintas dan angkutan;
- b. pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor dan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- c. penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;

- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan di seksi pengujian sarana; dan
- e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Bidang Prasarana**

Bidang Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perencanaan, pembangunan, dan pegerasian prasarana;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pegerasian prasarana;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pegerasian prasarana; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Seksi Perencanaan Prasarana**

Seksi Perencanaan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Perencanaan Prasarana.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Perencanaan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di seksi perencanaan prasarana;
- b. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
- c. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau;
- d. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten; dan
- e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Seksi Pembangunan Prasarana**

Seksi Pembangunan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Pembangunan Prasarana.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Pembangunan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di seksi Pembangunan parasara;
- b. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- c. Penerbitan izin dan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal;
- d. Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan pelabuhan sungai dan danau;
- e. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- f. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- g. Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
- h. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan, izin operasi prasarana perkerataapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten; dan
- i. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **Seksi Pengoperasian Prasarana**

Seksi Pengoperasian Prasarana mempunyai tugas pokok merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait dengan Pengoperasian Prasarana.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Pengoperasian Prasarana mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di seksi pengoperasian prasarana;
- b. penerbitan izin pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
- c. penerbitan izin pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
- d. penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
- e. penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- f. penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) didalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;

#### **Bidang Pengembangan Dan Keselamatan**

Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan dan Keselamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengembangan dan Keselamatan menyelenggarakan fungsi :

- e. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pemanduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;

- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Seksi Pemaduan Moda Dan Teknologi Perhubungan**

Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di seksi Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
- b. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Seksi Lingkungan Perhubungan**

Seksi Lingkungan Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Lingkungan Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Lingkungan Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di seksi Lingkungan Perhubungan; dan
- b. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Seksi Keselamatan**

Seksi Keselamatan mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait dengan Keselamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Keselamatan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan kabupaten, laik fungsi jalan keselamatan sarana dan parasarana;
- b. penyiapan fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. penyiapan fasilitasi keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan;

- d. penyiapan bahan fasilitasi penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

### **Struktur Organisasi**

Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Rincian Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Bagan Struktur Organisasi dapat dilihat pada **Lampiran 1** Renstra Dinas Perhubungan Pesisir Selatan 2016-2021.

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :

1. Kepala Dinas ( Eselon II.b )
2. Sekretaris ( Eselon III.a ) dibantu 2 (tiga) Sub Bagian (Eselon IV.a) yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan ( Eselon III.b ) dibantu 3 (tiga) Kepala Seksi (Eselon IV.a) yaitu Seksi Lalu Lintas, Seksi Angkutan, dan Seksi Pengujian Sarana;
4. Bidang Prasarana ( Eselon III.b ) dibantu 3 (tiga) Kepala Seksi (Eselon IV.a) yaitu Seksi Perencanaan Prasarana, Seksi Pembangunan Prasarana dan Seksi Pengoperasian Prasarana;
5. Bidang Pengembangan dan Keselamatan ( Eselon III.b ) dibantu 3 (tiga) Kepala Seksi (Eselon IV.a) yaitu Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan, Seksi Lingkungan Perhubungan, dan Seksi Keselamatan;

## 2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

### a. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan dan Jumlah Pejabat Struktural adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2.1**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan**

<b>NO.</b>	<b>PANGKAT / GOL</b>	<b>JUMLAH</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
2	PEMBINA TK.I / IV b	2
3	PEMBINA / IV a	2
4	PENATA TK. I / III d	6
5	PENATA / III c	5
6	PENATA MUDA TK.I / III b	4
7	PENATA MUDA / III a	4
8	PENGATUR TK.I / II d	5
9	PENGATUR / II c	16
10	PENGATUR MUDA TK.I / II b	2
11	PENGATUR MUDA / II a	0
12	JURU TK.I / I d	-
13	JURU / I c	1
14	JURU MUDA TK. I / I b	-
15	JURU MUDA / I a	-
<b><i>JUMLAH</i></b>		<b><i>47</i></b>

**Tabel 2.2.2**

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pegawai**

<b>NO.</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	S3	-
2	S2	6
3	S1 / D4	14
4	D III	2
5	D II	-
6	SMU/SMA Sederajat	24
7	SMP	-
8	SD	1
	<b><i>JUMLAH</i></b>	<b><i>47</i></b>

**Tabel 2.2.3**

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatannya**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JUMLAH</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	STRUKTURAL	16
2	FUNGSIONAL UMUM	31
	<b><i>JUMLAH</i></b>	<b><i>47</i></b>

**b. Sarana dan Prasarana Penunjang**

Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan barang tidak bergerak dan bergerak serta barang perlengkapan lainnya, disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.2.4**  
**Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan**  
**Kabupaten Pesisir Selatan**

No.	Asset	Jumlah	Satuan	Harga (Rp.)
1	Tanah	1	Bidang	394.467.844,-
2	Peralatan dan Mesin	1.387	Unit	10.548.020.903,-
3	Gedung dan Bangunan	32	Unit	2.646.327.903,-
4	Jalan. Irigasi dan Jaringan	64	Buah	8.306.470.434,-
5	Aset Tetap lainnya	0	Buah	0,-
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	Unit	0,-
7	Aset lainnya	1	Buah	34.650.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>1.485</b>		<b>21.929.937.084</b>

**2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan**

Dinas Perhubungan memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung pelayanan transportasi di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mewujudkan transportasi yang aman, nyaman, lancar dan tertib kepada masyarakat dalam mendukung produktivitas daerah.

Adapun Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu pada Cascading Dinas Perhubungan Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan yaitu :

**1. Tujuan** “Meningkatnya Keselamatan Transportasi”

Indikator “Persentase Menurunnya Angka Kecelakaan Pertahun”

**2. Sasaran**

a. Terwujudnya Pelayanan Transportasi Yang Handal

Indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi”

b. Meningkatkan Kesadaran Tertib berlalu Lintas

Indikator “Persentase Menurunnya Pelanggaran Berlalu Lintas”

**Tabel 2.3.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan**  
**Kabupaten Pesisir Selatan**

No	Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Tahun Ke (%)				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Terlaksananya program kerja dinas sesuai dengan sasarannya	9 program 32 Kegiatan	10 program 39 kegiatan	9 program 37 kegiatan	12 program 39 kegiatan	13 program 40 Kegiatan	9 program 32 Kegiatan	10 program 39 kegiatan	9 program 37 kegiatan	12 program 38 kegiatan	13 program 37 kegiatan	100	100	100	97	93
2	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian terhadap lalu lintas	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100	100	100	100	100
3	Terpeliharanya fasilitas perlengkapan jalan:															
	- Traffic Light	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5 Unit	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5 Unit	100	100	100	100	100
	- Rambu-Rambu	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	50 Unit	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	50 Unit	100	100	100	100	100
	- Halte	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	-	100	100	100	100	100
	- Marka	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	714,20 M	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	714,20 M	100	100	100	100	100
4	Tersedianya/terpasangnya fasilitas perlengkapan jalan:															
	- Rambu-Rambu Standart	85 bh	100 bh	150 bh	200 bh	180 bh	60 bh	78 bh	100 bh	116 bh	180 bh	70,59	78,00	66,67	58	100
	- RPPJ	15 bh	15 bh	20 bh	15 bh	8 bh	5 bh	6 bh	10 bh	10 bh	8 bh	33,33	40	50	66,67	100
	- Marka Jalan	3.000 M	4.500 M	5.000 M	5.500 M	5.440 M	2.050 M	2.540 M	4.000 M	5.320 M	5.440 M	68,33	56,44	80	96,73	100
	- Pagar Pengaman Jalan	-	-	-	200 M	100 M	-	-	-	0	100 M	-	-	-	-	100
	- Pengadaan APIL	1 Unit	-	1 Unit		-	1 Unit	-	1 Unit	-	-	100	-	100	-	-

No	Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Tahun Ke (%)				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
5	Terlaksananya koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	4 kl/Thn	4 kl/Thn	4 kl/Thn	4 kl/Thn	4 kl/Thn	4 kl/Thn	4 kl/Thn	4 kl/Thn	4 kl/Thn	4 kl/Thn	100	100	100	100	100
6	Terpeliharanya bus perhubungan sebagai alat transportasi pelajar	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100	100	100	100	100
7	Jumlah peserta sosialisasi perhubungan laut	-	75 orang	-	-	225 orang	-	75 Orang	-	-	150 orang	-	100	-	100	66,67
8	Terlaksananya terhadap muatan kapal	-	-	1 keg	1 keg	1 keg	-	-	1 keg	1 keg	1 keg	-	-	100	100	100
9	Jumlah kendaraan yang melakukan uji ulang KIR	2.500	2.500	3.000	4.000	7.500	3.413	3.935	5.390	5.867	9.954	136,52	157,40	179,66	146,67	132,77
10	Terlaksananya penyebaran informasi kepada masyarakat melalui unit penerangan keliling	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100
11	Terlaksananya penyebaran informasi kepada masyarakat melalui media on line/website	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100	100

Tabel 2.3.2

## ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

## KABUPATEN PESISIR SELATAN

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-rata pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN DAERAH																	
Pendapatan Asli Daerah																	
Hasil pajak daerah																	
Hasil retribusi daerah	948.944.500	801.472.800	971.692.800	1.742.592.800	2.107.300.000	669.417.050	708.770.810	1.695.880.459	1.577.665.844	2.282.367.080	70,54	88,43	174,53	90,54	108,31	289.588.875	403.237.508
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan																	
Dana Perimbangan	2.445.025.000	2.591.510.000	3.331.157.317	4.009.286.315	4.457.612.450	2.379.799.319	2.554.602.072	3.290.901.512	3.926.778.432	3.915.469.875	97,33	98,58	98,79	97,94	87,84	504.146.863	383917639
- Bagi Hasil Pajak/ bagi hasil bukan pajak																	
- Dana Alokasi Umum	1.617.355.000	2.338.565.000	2.929.745.317	3.551.334.315	3.781.354.450	1.600.236.320	2.302.336.072	2.892.141.512	3.471.288.432	3.241.949.875	98,94	98,45	98,72	97,75	85,74	540.999.863	410.428.389
- Dana Alokasi Khusus	827.670.000	252.945.000	401.412.000	457.952.000	676.258.000	779.562.999	252.266.000	398.760.000	455.490.000	673.520.000	94,19	99,73	99,34	99,46	99,60	(37.853.000)	(26.510.750)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah																	
- Pendapatan Hibah																	
- Dana Darurat																	
- Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya																	
BELANJA DAERAH																	
Belanja Tidak Langsung	2.777.176.396	2.792.153.949	2.963.179.621	2.996.697.675	3.392.998.942	2.770.610.006	2.752.626.730	2.751.178.310	2.923.011.789	3.315.416.226	99,76	98,58	92,85	97,54	97,71	153.955.637	136.201.555
- Belanja pegawai	2.777.176.396	2.792.153.949	2.963.179.621	2.996.697.675	3.392.998.942	2.770.610.006	2.752.626.730	2.751.178.310	2.923.011.789	3.315.416.226	99,76	98,58	92,85	97,54	97,71	153.955.637	136.201.555
- Belanja bunga																	
- Belanja subsidi																	
- Belanja hibah																	
- Belanja bantuan sosial																	
- Belanja bagi hasil kepada provinsi/ kabupaten/ kota dan pemerintahan desa																	

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-rata pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
- Belanja tidak terduga																	
Belanja Langsung	2.445.025.000	2.591.510.000	3.331.157.317	4.009.286.315	4.457.612.450	2.379.799.319	2.554.602.072	3.290.901.512	3.926.778.432	3.915.469.875	97,33	98,58	98,79	97,94	87,84	503.146.862	383.917.639
- Belanja pegawai	45.100.000	111.750.000	201.110.000	137.450.000	116.300.000	40.300.000	111.500.000	192.945.000	115.100.000	107.000.000	89,36	99,78	95,94	83,74	92,00	17.800.000	16.675.000
- Belanja barang dan jasa	1.563.895.000	2.116.870.000	2.592.741.317	3.041.234.315	3.113.185.260	1.551.595.320	2.082.966.922	2.564.016.957	2.983.538.432	2.701.353.775	99,21	98,40	98,89	98,10	86,77	387.322.565	287.439.614
- Belanja modal	836.030.000	362.890.000	537.306.000	830.602.000	1.228.127.190	787.903.999	360.135.150	533.939.555	828.140.000	1.107.116.100	94,24	99,24	99,37	99,70	90,15	98.024.298	79.803.025
TOTAL																	

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan**

### **a. Tantangan**

1. Belum Terpenuhinya fasilitas perlengkapan jalan (Halte, Rambu-rambu Lalu Lintas, RPPJ, Marka Jalan, Pagar Pengaman Jalan (Guardrail), Traffic Light, Warning Light, Lampu Penerangan Jalan, Papan Nama Jalan, Deliniator, dan sebagainya)
2. Belum Optimalnya pengawasan dan pengendalian angkutan.
3. Belum optimalnya Peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana perhubungan
5. Belum terpenuhinya alat uji dan fasilitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor
6. Belum terpenuhinya pelayanan dan fasilitas terminal dan perparkiran

### **b. Peluang**

1. Kesadaran masyarakat akan kebutuhan keselamatan dan kelancaran dalam transportasi
2. Pesisir selatan memiliki ruas jalan baik jalan nasional, propinsi, kabupaten maupun nagari.
3. memiliki potensi pulau-pulau baik pada sektor pariwisata maupun perikanan kelautan

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan**

**a. Kesekretariatan**

1. Masih kurangnya kualitas SDM di bidang Teknis Perhubungan, seperti : jurusan LLAJ, LLASDP, Transportasi Darat, Pengujian Kendaraan Bermotor.
2. Masih kurangnya SDM yang memiliki kualifikasi dalam pelaksanaan tugas pendukung administrasi, seperti : Akuntan, Arsiparis dan bersertifikat pengadaan barang.
3. Kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan administrasi

**b. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan**

1. Masih beroperasinya angkutan perdesaan yang sudah berusia tua karena tidak adanya peremajaan angkutan
2. Masih kurang disiplin dan minimnya pengetahuan tata tertib berlalulintas pengemudi angkutan umum
3. Masih leluasa beroperasinya angkutan penumpang umum ilegal
4. Belum maksimalnya pengawasan terhadap kondisi dan fungsi fasilitas serta perlengkapan jalan yang sudah terpasang, seperti : rambu lalu lintas, traffic light, warning light, marka jalan, pagar pengaman jalan, lampu penerangan jalan, patok pengaman jalan, paku marka jalan, cermin lalu lintas, zona selamat sekolah, RPPJ dan papan nama jalan
5. Belum maksimalnya pengendalian terhadap daerah rawan kecelakaan
6. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang fungsi dan faedahnya fasilitas perlengkapan jalan
7. Belum terlaksananya secara optimal sosialisasi/ penyuluhan kepada masyarakat dan siswa tentang undang-undang 22 Tahun 2009, tentang lalu lintas angkutan jalan.
8. Belum tersedianya sarana bantu navigasi

**c. Bidang Pasarana**

1. Masih minimnya fasilitas pejalan kaki dan perlengkapan jalan, seperti : halte, zebra cross, trotoar, rambu lalu lintas, traffic light, warning light, lampu penerangan jalan, marka jalan, pagar pengaman jalan, RPPJ, cermin lalu lintas, deliniator, paku marka dll.
2. Belum tersedianya terminal angkutan pada tiap kecamatan

3. Belum tersedianya sarana dermaga disetiap titik pemberangkatan penumpang

**d. Bidang Pengembangan dan Keselamatan**

1. Masih kurangnya/lemahnya pengawasan terhadap keselamatan perhubungan
2. Masih kurangnya sosialisasi/penyuluhan keselamatan terhadap pemilik moda transportasi
3. Masih kurangnya penanganan pada daerah rawan kecelakaan.

**3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Adapun tugas Dinas Perhubungan berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah berada pada misi II yang berbunyi “Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah”.

**3.3 Telaah Renstra Kementerian Perhubungan Serta Renstra Dinas Perhubungan Sumatera Barat**

**a. Telaah Renstra Kementerian Perhubungan**

Visi Kementerian Perhubungan 2015-2019 yaitu untuk mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.

**Handal** diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh pelosok tanah air;

**Berdaya Saing** diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan SDM yang berdaya saing internasional, profesional, mandiri, dan produktif;

**Nilai tambah** diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional (*national security dan sovereignty*) di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan (*sustainable development*).

Sedangkan misi dari kementerian Perhubungan yaitu :

1. Peningkatan pelayanan jasa transportasi untuk mewujudkan konektivitas nasional
2. Peningkatan Penyelenggaraan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK dalam rangka pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan

3. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dan restrukturisasi/reformasi kelembagaan dan regulasi

Adapun tujuannya adalah mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien yang didukung SDM transportasi yang berkompeten guna mendukung perwujudan Indonesia yang lebih sejahtera, sejalan dengan perwujudan Indonesia yang aman dan damai serta adil dan demokratis. Penyelenggaraan kegiatan transportasi yang efektif berkaitan dengan ketersediaan aksesibilitas, optimalisasi kapasitas, maksimalisasi kualitas serta keterjangkauan dalam pelayanan, sedangkan penyelenggaraan transportasi yang efisien berkaitan dengan kemampuan pengembangan dan penerapan teknologi transportasi serta peningkatan kualitas SDM transportasi yang berdampak kepada maksimalisasi dayaguna dan meminimalisasi biaya yang menjadi beban masyarakat

Sedangkan sasaran pembangunan infrastruktur transportasi Tahun 2015-2019, dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **1. Keselamatan dan Keamanan Transportasi**

Aspek keselamatan dan keamanan transportasi, meliputi :

- a. Menurunnya angka kecelakaan transportasi
- b. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi

#### **2. Pelayanan Transportasi**

Aspek pelayanan transportasi, meliputi :

- a. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi;
- b. Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan;
- c. Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan;
- d. Meningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance;
- e. Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan;
- f. Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi;
- g. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan *clean governance*;

#### **3. Kapasitas Transportasi**

Aspek kapasitas transportasi, meliputi :

1. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda;

2. Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang;
3. Meningkatkan layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan khususnya wilayah timur Indonesia;
4. Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan;
5. Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.

Yang berkaitan dengan Program Strategis Kementerian Perhubungan 2015 -2019 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

**1) Perhubungan Darat**

1. Pengadaan Bus Angkutan Umum/Pelajar/Mahasiswa sebagai alat transportasi pelajar
2. Pengadaan fasilitas perlengkapan jalan pada daerah yang rawan kecelakaan
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Fasilitas Perlengkapan Jalan LLAJ
4. Pengadaan dan Pemasangan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
5. Rehabilitasi/ Peningkatan Pembangunan Terminal

**2) Perhubungan Laut**

1. Pengadaan alat bantu sarana navigasi
2. Pembangunan Dermaga
3. Pemberian izin pass kecil untuk kapal nelayan dan angkutan penumpang

**3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Perwujudan pola tata ruang juga memberi implikasi terhadap pengembangan pelayanan di bidang perhubungan antara lain :

1. Rencana Sistem Jaringan Transportasi
  - a) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi meliputi sistem transportasi darat dan laut;
  - b) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jaringan jaringan jalan dan sistem terminal;
  - c) Sistem jaringan transportasi laut terdiri dari tatanan kepelabuhanan dan angkutan laut dan keselamatan pelayaran.
2. Pengembangan Sistem Terminal
  - a) Pengembangan dan pembangunan sistem terminal meliputi terminal regional tipe B, dan tipe C.

- b) Pengembangan terminal penumpang tipe B adalah pembangunan terminal di tapan dan peningkatan fungsi terminal Sago Painan.
  - c) Pembangunan terminal tipe C meliputi Koto XI Tarusan, Pasar Baru, Kambang, Inderapura dan Lunang.
3. Pengembangan Sistem Transportasi Laut
- a) Pengembangan sistem transportasi laut ditujukan untuk mendukung sistem produksi, sistem pergerakan penumpang dan barang dengan kegiatan sistem perekonomian antar kawasan maupun regional;
  - b) Pengembangan sistem transportasi laut dilakukan melalui pengembangan dan/atau pembangunan pengumpan dan pelabuhan pengumpul serta pembangunan pelabuhan baru; dan
  - c) Pengembangan pelabuhan dilakukan melalui :
    - Pengembangan pelabuhan, yaitu peningkatan dan perluasan fungsi pelabuhan
    - Panasahan Corocok Painan menjadi pelabuhan pengumpan Regional;
    - Pembangunan pelabuhan baru, yaitu pelabuhan pengumpan Regional di Air Haji;
    - Peningkatan pelayanan pelabuhan Pengumpan Lokal Muaro Sakai; dan
    - Pembangunan pelabuhan wisata Marina di Painan.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Adapun isu – isu strategis dinas berkaitan dengan permasalahan tugas dan fungsi OPD, adalah :

#### **A. Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan**

1. Minimnya SDM Teknis Perhubungan ;
2. Masih beroperasinya moda transportasi yang tidak laik jalan ;
3. Belum terlayannya seluruh trayek angkutan ;
4. Masih banyaknya daerah rawan kecelakaan ;
5. Belum terpenuhi kebutuhan terminal dan dermaga di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan
6. Kurangnya fasilitas kelengkapan jalan dan sarana navigasi ;
7. Kurangnya sarana dan prasarana perhubungan.

#### **B. Sasaran Jangka Menengah**

1. Menciptakan Pelayanan Transportasi yang Handal ;
2. Meningkatkan Kesadaran Tertib Berlalu Lintas

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan visi sebagai berikut :

***“ Terwujudnya Pelayanan Transportasi Yang Handal, Lancar, Aman dan Nyaman  
Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat ”***

Visi tersebut mengisyaratkan kondisi yang ideal yaitu terciptanya kualitas pelayanan jasa transportasi yang diindikasikan bahwa penyelenggaraan transportasi yang aman (*security*), selamat (*safety*), nyaman (*comfortable*), tepat waktu (*punctuality*), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dan memiliki daya saing yang diindikasikan bahwa penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau (*affordability*) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif. Serta memiliki nilai tambah yang diindikasikan bahwa penyelenggaraan transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya kegiatan usaha masyarakat.

Sedangkan **misi** tersebut adalah :

1. Menjalankan Administrasi Perkantoran secara profesional
2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam rangka menciptakan ketertiban lalu lintas dan angkutan dalam menekan angka kecelakaan
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi.
4. Memperluas jaringan pelayanan transportasi

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan tujuan sebagai berikut :

**Meningkatnya Keselamatan Transportasi**

Sedangkan sasaran dari Dinas Perhubungan kabupaten Pesisir selatan adalah :

1. Terwujudnya Pelayanan Transportasi Yang Handal
2. Meningkatkan Kesadaran Tertib Berlalu Lintas

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan**

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya Keselamatan Transportasi		Persentase Menurunnya Angka Kecelakaan Per tahun	5%	5%	5%	5%	5%	5%
		Terwujudnya Pelayanan Transportasi Yang Handal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi	70	73	75	80	85	90
		Meningkatnya Kesadaran Tertib Berlalu Lintas	Persentase Menurunnya Pelanggaran Berlalu Lintas	5%	5%	5%	5%	5%	5%

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi**

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik“ yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program, antara lain :

3. Mengendalikan kemacetan dan mengantisipasi kecelakaan lalu lintas yaitu dengan melengkapi fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, marka parkir, rekayasa lalu lintas, penertiban parkir liar dan sebagainya.
2. Meningkatkan prasarana dan fasilitas perhubungan seperti penyediaan halte angkutan umum yang layak dan memadai sehingga bisa memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa transportasi untuk lebih tertib menunggu sarana transportasi umum. Juga keberadaan terminal dengan segala fasilitas penunjang yang layak bagi penumpang / pengguna jasa transportasi umum bisa meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.
3. Mengirimkan aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengikuti beberapa Diklat baik Teknis maupun non Teknis juga melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dan kantor yang memadai.

#### **5.2. Kebijakan**

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu :

1. Manajemen Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan  
Dalam rangka menciptakan transportasi yang handal aman dan nyaman bagi pengguna jalan dan angkutan maka perlu dilakukan pembangunan dan perbaikan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan seperti :
  - a. Pembangunan dan rehabilitasi terminal

- b. Pembangunan dermaga dan tambatan kapal/perahu
- c. Penyediaan alat uji mekanis dan sarana pendukung pengujian kendaraan bermotor
- d. Pembangunan dan rehabilitasi Halte
- e. Pemasangan dan rehabilitasi rambu-rambu standar, RPPJ, cermin tikungan patok pengaman jalan, paku marka jalan, guard rill, marka jalan, zona selamat sekolah dll.

2. Manajemen Sumber Daya Manusia

Manusia sebagai pengguna jasa transportasi sangat mutlak untuk ditingkatkan. Hal ini disebabkan masih rendahnya disiplin pemakai jalan dan kemampuan petugas operasional di lapangan. Langkah langkah yang dilakukan antara lain :

- a. Memberikan penyuluhan tentang keselamatan berlalu lintas di jalan
- b. Meningkatkan kualitas pengusaha angkutan umum
- c. Meningkatkan kualitas petugas operasional

**Tabel 5.2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera			
MISI II : Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Terwujudnya Pelayanan Transportasi Yang Handal	Menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang memadai sehingga dapat mendukung perekonomian masyarakat	Memaksimalkan Sarana dan Prasarana Transportasi
		Rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi	
		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	
	Meningkatnya Kesadaran Tertib Berlalu Lintas	Pengadaan dan pemasangan serta pemeliharaan alat keselamatan lalu lintas dalam rangka menurunkan angka kecelakaan lalu lintas	Memaksimalkan Sosialisasi dan Penertiban Lalu Lintas
		Sosialisasi dan pembinaan lalu lintas dan angkutan	
		Penertiban terhadap alat transportasi yang tidak memenuhi standar keselamatan	

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **6.1. Rencana Program dan Kegiatan**

##### **Program dan Kegiatan Pokok Sesuai Kewenangan**

Kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural
2. Keputusan Bupati Nomor : 34 tahun 2015 tentang Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 07 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yaitu UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dan UPTD Terminal dan Perpakiran
4. Peraturan Daerah Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
5. Peraturan Daerah Nomor : 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
6. Peraturan Daerah Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Tempat Khusus Parkir
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Terminal
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 20 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Izin Trayek
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 551/179/Kpts/BPTS-PS/2015 tentang penetapan Kawasan Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Pesisir Selatan

Sehubungan dengan kewenangan tersebut, maka program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program tersebut akan akan direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan :

- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- b. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- c. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- d. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

- e. Penyediaan alat tulis kantor
  - f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  - i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - j. Penyediaan makanan dan minuman
  - k. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
  - l. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
  - m. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
  - n. Penyediaan jasa tenaga kerja non PNS
  - o. Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan
  - p. Penyusunan rencana strategis SKPD
2. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur  
Program tersebut akan akan direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan :
- a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
  - b. Pengadaan Meubiler
  - c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor
  - d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
  - e. Pembangunan gedung kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur  
Program tersebut akan akan direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan :
- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  
Program tersebut akan akan direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan :
- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  
Program tersebut akan akan direalisasikan dengan kegiatan :
- a. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
6. Program Pembangunan Wawasan Kebangsaan
- a. Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional

7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;  
Program tersebut akan akan direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan :
  - a. Rehabilitasi/pemeliharaan alat keselamatan lalu lintas
  - b. Rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas pos retribusi (TPR)
  - c. Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal dan pelabuhan
  
8. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;  
Program tersebut akan akan direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan :
  - a. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
  - b. Penunjang Kegiatan WTN
  - c. Pengawasan dan pengendalian LLAJ
  - d. Operasional pengamanan lalu lintas angkutan laut
  - e. Pembinaan dan penertiban lalu lintas angkutan laut
  - f. Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas
  - g. Pemilihan sopir teladan (Abdiyasa)
  - h. Operasional transportasi pelayanan pendidikan
  - i. Pelayanan Terminal dan Perparkiran
  - j. Penyusunan Data Base Perhubungan Berbasis Sparsial
  - k. Penyusunan alur jaringan trayek transportasi
  - l. Pemilihan dan pemberian penghargaan bidang perhubungan
  - m. Pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan laut
  - n. Pelayanan Pemungutan Retribusi Daerah
  
9. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan  
Program tersebut akan akan direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan :
  - a. Pengembangan Pembangunan Pelabuhan
  - b. Pembangunan Fasilitas Transportasi Pedesaan (DAK)
  - c. Pembangunan Fasilitas Transportasi Pedesaan (Penunjang DAK)
  - d. Pembangunan Halte
  - e. Pembangunan Dermaga/ Tambatan Kapal/perahu
  - f. Pembangunan Gedung Terminal
  - g. Pembangunan Pos Retribusi
  - h. Pembangunan fasilitas pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
  
10. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas;  
Program tersebut akan akan direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan :
  - a. Pengadaan dan pemasangan Alat Keselamatan Lalu Lintas
  - b. Pengadaan RPPJ

- c. Pengadaan dan Pemasangan Papan Nama Jalan
  - d. Pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum
  - e. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Penerangan Jalan Umum
  - f. Diklat Teknis Perhubungan
11. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor;  
Program tersebut akan akan direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan :
- a. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor
  - b. Pengadaan alat uji mekanis PKB
12. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah  
Program tersebut akan akan direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan :
- a. Pelayanan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah
13. Program Pengembangan Data/ Informasi  
Program tersebut akan akan direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan :
- a. Penyebarluasan informasi pembangunan

## 6.2 Program Kegiatan dan Pendanaan Indikatif

Tabel 6.2.1  
Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Indikatif  
Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan  
Tahun 2016 s/d 2021

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun-2016		Tahun-2017		Tahun-2018		Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun-2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Yang Bertanggung jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>URUSAN PERHUBUNGAN</b>																					
Meningkatnya Keselamatan Transportasi				Persentase Menurunnya Angka Kecelakaan Per tahun		5%	2.144.364.270	5%	2.276.785.220	5%	9.518.000.000	5%	19.997.794.000	5%	27.815.400.000	5%	26.336.000.000	30%	81.018.343.490		
	Terwujudnya Pelayanan Transportasi Yang Handal			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi		70%	779.203.250	73%	1.010.285.220	75%	1.248.000.000	80%	8.725.000.000	85%	12.101.000.000	90%	11.501.000.000	90%	27.614.488.470		
			Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LIA1	Persentase Prasarana dan Fasilitas LIA1 dalam Kondisi Baik			258.367.210		410.285.220		550.000.000		450.000.000		500.000.000		500.000.000		2.668.652.430		
			Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal/ Pelabuhan	Terlaksananya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal/ Pelabuhan		1 Paket	88.693.000	1 Paket	350.000.000	1 Paket	350.000.000	2 Paket	350.000.000	2 Paket	350.000.000	2 Paket	350.000.000	9 Paket	1.838.693.000	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan
			Rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas pos retribusi (TPR)	Terlaksananya Rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas pos retribusi (TPR)		2 Pos TPR	169.674.210	1 Pos TPR	60.285.220	1 Pos TPR	200.000.000	2 Pos TPR	100.000.000	2 Pos TPR	150.000.000	2 Pos TPR	150.000.000	7 Paket	829.959.430	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan
			<b>Program peningkatan pelayanan</b>	<b>Persentase Sarana Transportasi Dalam Kondisi Baik</b>			<b>520.836.040</b>		<b>600.000.000</b>		<b>698.000.000</b>		<b>825.000.000</b>		<b>1.701.000.000</b>		<b>1.701.000.000</b>		<b>6.045.836.040</b>		
			Anakutan Operasional Transportasi Pelayanan pendidikan	Terlaksananya Operasional Transportasi Pelayanan pendidikan		12 Bulan	270.836.040	12 Bulan	350.000.000	12 Bulan	398.000.000	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	500.000.000	12 Bulan	500.000.000	72 Bulan	2.268.836.040	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan
			Pelayanan Terminal dan Perparkiran	Terlaksananya Pelayanan Terminal dan Perparkiran		12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	376.000.000	12 Bulan	376.000.000	72 Bulan	1.752.000.000	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan						
			Penyusunan Data Base Perhubungan berbasis spasial	Tersedianya Data dan Peta Sarana dan Prasarana Perhubungan		-	-	-	-	-	-	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	250.000.000	72 Bulan	750.000.000	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan
			Penyusunan Alur Jaringan Trayek transportasi	Jumlah peraturan tentang alur jaringan trayek transportasi		-	-	-	-	1 Perbup	50.000.000	1 Perbup	75.000.000	1 Perbup	75.000.000	1 Perbup	75.000.000	1 Perbup	275.000.000	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan
			Pelayanan Pemungutan Retribusi Daerah	Terlaksananya Pemungutan Retribusi		-	-	-	-	-	-	-	-	12 Bulan	500.000.000	12 Bulan	500.000.000	72 Bulan	1.000.000.000	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan
			<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>	<b>Persentase Sarana Transportasi Dalam Kondisi Baik</b>			-		-		-		<b>7.450.000.000</b>		<b>9.900.000.000</b>		<b>9.300.000.000</b>		<b>18.900.000.000</b>		
			Pengembangan Pembangunan Pelabuhan	Terlaksananya Revisi Dokumen DED, Dokumen Lingkungan Tersedianya Fisibility Study (FS) Pelabuhan Muara Sakai		-	-	-	-	-	-	3 Dokumen	2.150.000.000	5 Dokumen	3.100.000.000	3 Dokumen	2.500.000.000	9 Dokumen		Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan
			Pembangunan Fasilitas Transportasi Pedesaan (DAK)	Tersedianya Fasilitas Transportasi Pedesaan																Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan

			Pembangunan Fasilitas Transportasi Pedesaan (Penunjang DAK)	Tersedianya Fasilitas Transportasi Pedesaan															Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan	
			Pembangunan Halte	Jumlah Halte						3 Unit	300.000.000	4 Unit	300.000.000	3 Unit	300.000.000	6 Unit	900.000.000		Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan	
			Pembangunan Dermaga/ Tambatan Kapal/ perahu	Tersedianya Dermaga/ Tambatan Kapal/ perahu						1 Unit	2.000.000.000	1 Unit	2.000.000.000	1 Unit	2.000.000.000	3 Unit	6.000.000.000		Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan	
			Pembangunan Gedung Terminal	Tersedianya Terminal Tipe C						1 Terminal	2.000.000.000	1 Terminal	2.000.000.000	1 Terminal	2.000.000.000	2 Terminal	6.000.000.000		Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan	
			Pembangunan Pos Retribusi	Tersedianya Pos Retribusi						1 Unit	1.000.000.000	1 Unit	2.000.000.000	1 Unit	2.000.000.000	1 Unit	5.000.000.000		Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan	
			Pembangunan Fasilitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor								1 Paket	500.000.000	1 Paket	500.000.000	2 Paket	1.000.000.000		Dinas Perhubungan	IV Jural	
	Meningkatnya Kesadaran Tertib Berjalan Lintas			Persentase Menurunnya Pelanggaran Berjalan Lintas		5%	1.365.161.020	5%	1.266.500.000	5%	8.270.000.000	5%	11.272.794.000	5%	15.714.400.000	5%	14.835.000.000	30%	53.403.855.020		
			<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b>	<b>Persentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ Dalam Kondisi Baik</b>			<b>104.197.260</b>		<b>66.000.000</b>		<b>190.000.000</b>		<b>250.000.000</b>		<b>250.000.000</b>		<b>250.000.000</b>		<b>1.110.197.260</b>		
			Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat Keselamatan Lalu Lintas	Terlaksananya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat Keselamatan Lalu Lintas		3 Paket	104.197.260	2 Paket	66.000.000	4 Paket	190.000.000	5 Paket	250.000.000	5 Paket	250.000.000	5 Paket	250.000.000	24 Paket	1.110.197.260	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan
			<b>Program peningkatan pelayanan angkutan</b>	<b>Persentase Stakeholder memahami aturan keselamatan yang berlaku</b>			<b>547.399.920</b>		<b>695.000.000</b>		<b>1.160.000.000</b>		<b>885.000.000</b>		<b>1.560.000.000</b>		<b>1.560.000.000</b>		<b>7.087.399.920</b>		
			Sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Jumlah Sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan						1 Paket	180.000.000	1 Paket	180.000.000	1 Paket	180.000.000	1 Paket	180.000.000	4 Paket	720.000.000	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan
			Penunjang Kegiatan WTN	Terlaksananya Kegiatan WTN		Piala WTN	63.966.800	Piala WTN	75.000.000	Piala WTN	100.000.000	Piala WTN	100.000.000	0	-	0	-	Piala WTN	338.966.800	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan
			Pengawasan dan Pengendalian LLAJ	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian LLAJ		12 Bulan	209.879.500	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	370.000.000	12 Bulan	200.000.000	12 Bulan	350.000.000	12 Bulan	350.000.000	72 Bulan	1.729.879.500	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan
			Operasional Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Laut	Terlaksananya Operasional Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Laut		12 Bulan	160.761.500	12 Bulan	200.000.000	12 Bulan	260.000.000	12 Bulan	180.000.000	0	-	0	-	48 Bulan	800.761.500	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan
			Pembinaan dan Penertiban Lalu Lintas Angkutan Laut	Terlaksananya Pembinaan dan Penertiban Lalu Lintas Angkutan Laut		12 Bulan	112.792.120	12 Bulan	120.000.000	12 Bulan	120.000.000	12 Bulan	100.000.000	0	-	0	-	48 Bulan	452.792.120	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan
			Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Berjalan Lintas	Jumlah Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Berjalan Lintas				1 Paket	25.000.000	1 Paket	80.000.000	1 Paket	75.000.000	0	-	0	-	3 Paket	180.000.000	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan
			Pemilihan Sopir Teladan (Abdiyasa)	Terlaksananya Pemilihan Sopir Teladan (Abdiyasa)				1 Paket	25.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	0	-	0	-	3 Paket	125.000.000	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan
			Pemberian Penghargaan Bidang Perhubungan	Penghargaan Bidang Perhubungan								Piala WTN	680.000.000	Piala WTN	680.000.000	Piala WTN	2.040.000.000	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan		
				Jumlah Pelajar yang dibina									30 Orang		30 Orang		30 Orang				
				Jumlah Sopir Yang Dibina									10 Orang		10 Orang		10 Orang				



Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor		12 Bulan	5.682.000	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	12.000.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	20.000.000	72 Bulan	87.682.000	Dinas Perhubungan	Kec. IV Jurai
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		35 unit dan 17 buah	207.900.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000		707.900.000	Dinas Perhubungan	Kec. IV Jurai
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		3 Media	20.400.000	3 Media	20.400.000	3 Media	20.400.000	3 Media	14.500.000	3 Media	14.500.000	3 Media	14.500.000	3 Media	104.700.000	Dinas Perhubungan	Kec. IV Jurai
Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan Minum rapat, Makan Minum Tamu dan Makan Minum Harian		12 Bulan	16.800.000	12 Bulan	25.350.000	12 Bulan	40.000.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	72 Bulan	232.150.000	Dinas Perhubungan	Kec. IV Jurai
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi keluar daerah		12 Bulan	204.650.000	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	215.000.000	12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	150.000.000	72 Bulan	1.119.650.000	Dinas Perhubungan	Indonesia
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi dalam daerah		12 Bulan	157.200.000	12 Bulan	125.000.000	12 Bulan	180.000.000	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	100.000.000	72 Bulan	762.200.000	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan
Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS	Terlaksananya pembayaran jasa tenaga kerja non PNS		1 Orang	13.000.000	1 Orang	13.000.000	1 Orang	13.000.000	2 Orang	26.000.000	2 Orang	26.000.000	2 Orang	26.000.000	1 Orang	117.000.000	Dinas Perhubungan	Kec. IV Jurai
Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan	Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan		7 Dokumen	34.260.000	8 Dokumen	37.000.000	9 Dokumen	70.000.000	9 Dokumen	180.000.000	9 Dokumen	180.000.000	9 Dokumen	180.000.000	9 Dokumen	681.260.000	Dinas Perhubungan	Kec. IV Jurai
Penyediaan jasa pengamanan kantor	Tersedianya personil pengamanan kantor								1 Orang	13.000.000	1 Orang	13.000.000	1 Orang	13.000.000	1 Orang	39.000.000	Dinas Perhubungan	Kec. IV Jurai
Penyusunan rencana strategis SKPD	Tersedianya renstra Dinas Perhubungan										1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	100.000.000	Dinas Perhubungan	Kec. IV Jurai
<b>Program Peningkatan Sarana &amp; Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>			<b>262.059.000</b>		<b>837.750.000</b>		<b>3.350.000.000</b>		<b>1.855.000.000</b>		<b>6.875.000.000</b>		<b>6.825.000.000</b>		<b>20.004.809.000</b>		
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional		-	-	6 unit	545.000.000	6 unit	2.700.000.000	4 Unit	280.000.000	7 Unit	4.200.000.000	7 Unit	4.200.000.000	30 unit	11.925.000.000	Dinas Perhubungan	Kec. IV Jurai
Pengadaan Meubiler	Terlaksananya Pengadaan Meubiler		-	-	-	-	1 Paket	200.000.000	4 Paket	800.000.000	Dinas Perhubungan	Kec. IV Jurai						
Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor		1 Unit	40.750.000	2 Unit	67.750.000	2 Unit	100.000.000	2 Unit	100.000.000	2 Unit	150.000.000	2 Unit	100.000.000	2 Unit	558.500.000	Dinas Perhubungan	Kec. IV Jurai
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional Yang Dipelihara		11 Unit	221.309.000	17 Unit	225.000.000	17 Unit	300.000.000	21 Unit	400.000.000	25 Unit	450.000.000	29 Unit	450.000.000	29 Unit	2.046.309.000	Dinas Perhubungan	Kec. IV Jurai
Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengaspalan Jalan dan pelataran Parkir Tersedianya Tempat Parkir Pada Dinas Perhubungan		-	-	-	-	1 Paket	50.000.000	2 Paket	875.000.000	4 Paket	1.875.000.000	4 Paket	1.875.000.000	11 Paket	4.675.000.000	Dinas Perhubungan	Kec. IV Jurai

<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur</b>			-		<b>250.000.000</b>		<b>250.000.000</b>		<b>180.000.000</b>		<b>350.000.000</b>		<b>350.000.000</b>		<b>1.380.000.000</b>		
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Harian Tersedianya Pakaian Khusus		-	-	1 Paket	250.000.000	1 Paket	250.000.000	2 Paket	180.000.000	2 Paket	350.000.000	2 Paket	350.000.000	8 Paket	1.380.000.000	Dinas Perhubungan	Kec. IV Jurai

<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>			<b>50.000.000</b>		<b>45.000.000</b>		<b>45.000.000</b>		<b>45.000.000</b>		<b>45.000.000</b>		<b>45.000.000</b>		<b>275.000.000</b>		
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur Yang Memiliki Sertifikasi/ Kompetensi		1 Paket	50.000.000	1 Paket	45.000.000	1 Paket	45.000.000	1 Paket	45.000.000	1 Paket	45.000.000	1 Paket	45.000.000	6 Paket	275.000.000	Dinas Perhubungan	Indonesia
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Tingkat Ketepatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan</b>			<b>52.707.790</b>		<b>55.000.000</b>		<b>100.000.000</b>		<b>150.000.000</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>357.707.790</b>		
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan		12 Bulan	52.707.790	12 Bulan	55.000.000	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	150.000.000	0	-	0	-	0	357.707.790	Dinas Perhubungan	Peisir Selatan
<b>Program Pembangunan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Terlaksananya Pembangunan Wawasan Kebangsaan</b>			<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>45.000.000</b>		<b>45.000.000</b>		<b>45.000.000</b>		<b>135.000.000</b>		
Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	Terlaksananya Peringatan Hari Perhubungan Nasional			-		-		-	1 Kali	45.000.000	1 Kali	45.000.000	1 Kali	45.000.000	3 Kali	135.000.000	Dinas Perhubungan	IV Jurai
<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>			<b>210.753.040</b>		<b>250.000.000</b>		<b>590.000.000</b>		<b>350.000.000</b>		<b>500.000.000</b>		<b>500.000.000</b>		<b>2.400.753.040</b>		
Pelayanan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah		12 Bulan	210.753.040	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	590.000.000	12 Bulan	350.000.000	12 Bulan	500.000.000	12 Bulan	500.000.000	72 Bulan	2.400.753.040	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan
<b>Program Pengembangan Data/ Informasi</b>	<b>Persentase Penyebarluasan Informasi</b>			<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>100.000.000</b>		<b>100.000.000</b>		<b>100.000.000</b>		<b>300.000.000</b>		
Penyebarluasan informasi pembangunan	Tewrsebarnya informasi pembangunan			-		-		-	2 Kali	100.000.000	2 Kali	100.000.000	2 Kali	100.000.000	6 Kali	300.000.000	Dinas Perhubungan	IV Jurai
<b>J U M L A H</b>				<b>3.690.031.050</b>		<b>4.619.285.220</b>		<b>14.831.400.000</b>		<b>23.731.294.000</b>		<b>36.788.900.000</b>		<b>35.259.500.000</b>		<b>111.850.410.270</b>		

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perhubungan Pesisir Selatan ini, merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan selama periode 2016-2021, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021.

Renstra Dinas Perhubungan kabupaten Pesisir ini memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan. Renstra merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan rencana tahunan.

Renstra ini dilaksanakan selama periode lima tahun, 2016 - 2021 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh, bertanggungjawab, melakukan pengawasan dan mengevaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati dan Wakil Bupati, serta secara moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah arus penumpang angkutan umum	1.285.300	930.000	950.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000	1.150.000
	Jumlah uji KIR angkutan umum	9.954	7.200	7.400	7.500	8.000	8.500	9.000	9.000
	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis (angkutan umum)	3	0	0	1	1	1	1	4
	Kepemilikan KIR angkutan umum	0	0	15,71	10	7,5	5	2,5	2,5
	Pemasangan rambu-rambu pertahun	765	142	0	0	100	100	100	1.207
	Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan	0,060	0,059	0,057	0,056	0,055	0,054	0,053	0,053
	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun	124148	88.000	90.000	92.000	94.000	96.000	98.000	98.000

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Formulasi	Target						Sumber Data	Penanggung Jawab
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	Terwujudnya Pelayanan Transportasi Yang Handal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi	Jumlah Kuisisioner Yang Dibagikan - Jumlah Responden Yang Menyatakan Tidak Puas	70	73	75	80	85	90	Bagian Sekretariat, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Prasarana, Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Dinas Perhubungan
	Meningkatnya Kesadaran Tertib Berlalu Lintas	Persentase Menurunnya Pelanggaran Berlalu Lintas	(Jumlah Pelanggaran Tahun Lalu - Jumlah Pelanggaran Tahun Ini) / Jumlah Pelanggaran Tahun Lalu (X 100)	5%	5%	5%	5%	5%	5%	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Dinas Perhubungan

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan transportasi tahun 2016-2021. Dokumen ini selain berisi rencana kegiatan-kegiatan Dinas Perhubungan juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan. Renstra mencakup berbagai indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian rencana yang sudah dirumuskan tersebut.

Dokumen Renstra Dinas perhubungan ini disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai faktor yang bersumber dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa substansi pada dokumen tersebut tidak dapat mengalami perubahan. Penyusunan dokumen renstra didasari oleh kesadaran bahwa lingkungan strategik bersifat sangat dinamis, sehingga selalu terbuka kemungkinan bagi proses perubahan dalam dokumen Renstra. Dalam konteks dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan ini, perubahan tersebut juga masih dimungkinkan untuk proses penyesuaian dalam lingkungan strategik Dinas Perhubungan, Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu 2016-2021.

Demikian Dokumen Renstra ini disusun, dan disadari masih banyak kelemahan dan kekurangan-kekurangan data, kami berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat.

Painan, 13 Agustus 2019

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESIR SELATAN



SAJAWAN, S.Sos, M.Si  
NIP. 197002041991011002

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KETERANGAN:**

Eselon II.B = 1  
Eselon III.A = 1  
Eselon III.B = 3  
Eselon IV.A = 11

**PERBUP NO. 50 TAHUN 2016**

<b>KEPALA DINAS ( II.B )</b>
<b>GUNAWAN, S.Sos, M.Si</b>
NIP. 19700204 199101 1 002

<b>SEKRETARIS (III.A)</b>
<b>TAMRIN S.Sos, MM</b>
NIP. 19650611 199003 1 005

KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN (IV.A)
<b>VERAWATI, S.Sos</b>
NIP. 19760605 200801 2 029

KASUBBAG PERENCANAAN KEUANGAN DAN PELAPORAN (IV.A)
<b>ELZA NILAWATI, SE</b>
NIP. 19831227 200902 2 005

JABATAN FUNGSIONAL

<b>KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN (III.B)</b>
<b>FADLI AMRA, SH, MM</b>
NIP. 19761006 199403 1 001

<b>KEPALA BIDANG PRASARANA (III.B)</b>
<b>MARZAN, SH, MM</b>
NIP. 19700316 198903 1 001

<b>KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN (III.B)</b>
<b>DEDY MIRZA YULIANTO, ST, MT</b>
NIP. 19740707 200312 1 004

KEPALA SEKSI LALU LINTAS (IV.A)
<b>ARLIM ARIF</b>
NIP. 19660621 199003 1 006

KEPALA SEKSI ANGGKUTAN (IV.A)
<b>EDDY RICARDO,SH</b>
NIP. 19690514 200604 1 003

KEPALA SEKSI PENGUJIAN SARANA (IV.A)
<b>YUHERMAN, SH</b>
NIP. 19670316 198803 1 003

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
-----------------------------------

SEKSI PERENCANAAN PRASARANA (IV.A)
<b>MARTALENA, SH</b>
NIP. 19640405 198908 2 001

SEKSI PEMBANGUNAN PRASARANA (IV.A)
<b>HERRY SUSILO, ST</b>
NIP. 19751001 200501 1 011

KEPALA SEKSI PENGOPERASIAN PRASARANA (IV.A)
<b>AGUSTAR, SP</b>
NIP. 19630925 198711 1 001

KEPALA SEKSI PEMADUAN MODA DAN TEKNOLOGI PERHUBUNGAN (IV.A)
<b>YHOHANA RIZA, SH, M.Si</b>
NIP. 19650808 199303 2 006

KEPALA SEKSI LINGKUNGAN PERHUBUNGAN (IV.A)
<b>DANOFRIN</b>
NIP. 19621107 198503 1 005

KEPALA SEKSI KESELAMATAN (IV.A)
<b>ERMAN JUSA,SH</b>
NIP. 19730301 199403 1 003

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERBUP NO. 50 TAHUN 2016**

**KETERANGAN:**

Eselon II.B = 1  
Eselon III.A = 1  
Eselon III.B = 3  
Eselon IV.A = 11

<b>KEPALA DINAS ( II.B )</b>
.....
NIP. ....

<b>SEKRETARIS (III.A)</b>
.....
NIP. ....

<b>KASUBBAG UMUM &amp; KEPEGAWAIAN (IV.A)</b>
.....
NIP. ....

<b>KASUBBAG PERENCANAAN KEUANGAN DAN PELAPORAN (IV.A)</b>
.....
NIP. ....

<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>
.....

<b>KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN (III.B)</b>
.....
NIP. ....

<b>KEPALA BIDANG PRASARANA (III.B)</b>
.....
NIP. ....

<b>KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN (III.B)</b>
.....
NIP. ....

<b>KEPALA SEKSI LALU LINTAS (IV.A)</b>
.....
NIP. ....

<b>KEPALA SEKSI ANGKUTAN (IV.A)</b>
.....
NIP. ....

<b>KEPALA SEKSI PENGUJIAN SARANA (IV.A)</b>
.....
NIP. ....

<b>UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS</b>
------------------------------------

<b>SEKSI PERENCANAAN PRASARANA (IV.A)</b>
.....
NIP. ....

<b>SEKSI PEMBANGUNAN PRASARANA (IV.A)</b>
.....
NIP. ....

<b>KEPALA SEKSI PENGOPERASIAN PRASARANA (IV.A)</b>
.....
NIP. ....

<b>KEPALA SEKSI PEMADUAN MODA DAN TEKNOLOGI PERHUBUNGAN (IV.A)</b>
.....
NIP. ....

<b>KEPALA SEKSI LINGKUNGAN PERHUBUNGAN (IV.A)</b>
.....
NIP. ....

<b>KEPALA SEKSI KESELAMATAN (IV.A)</b>
.....
NIP. ....